

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Penerbit: Bumi Aksara, 2006.
- Azra, Azyumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Kusnardi, Moh dan Ibrahim Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Tata Negara, 1983.
- Ashidique, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata negara*. Depok Penerbit Rajawali Pers, 2019.
- Rispalman dkk. *Kewenangan Lembaga DPD RI Sebagai Lembaga Negara Legislatif*. Aceh: Penerbit Bandar Publishing, 2024.
- Marzuki, PM. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Waluyo, B. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008.
- Soemitro, RH. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1990.
- Firmanzah. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Rahardjo, S. *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006.
- Pratiwi CS., dan Purnamawati, SA. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Penerbit Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Penerbit Rajawalipress, 2014.
- Salim, A. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Pustaka Mahardika, 2013.
- Indroharto. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1994.
- Siallagan, H. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: Penerbit Lembaga Pemberdayaan Media dan Komunikasi, 2019.
- Siahaan, M. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku 1 beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan., 1999.

Harahap, Y. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009.

Prodjohamidjojo, M. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.

Jurnal

Toding, A. (2017). DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 299.

Patricia, F., Yapin, C. (2019). Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum. *Binamulia Hukum.*, (2), 156.

Azmi. (2018). Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum yang Berketuhanan. *ALQALAM.*, 35(1), 86.

Widodo, H., Prasetyo, DE. Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu. *Perspektif Hukum.*, 21(2), 211.

Nazril, MM., Dkk. Sinergi KPU, Bawaslu, dan DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi dalam Pemilu Indonesia”. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia.*, 1(4), 76.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Naskah Akademik RUU Pemilu. *Sekretariat Kemendagri*.

Yanti, H. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dan Penyelesaiannya Oleh Peradilan Tata Usaha Negara. *Legalitas* 1 , 77.

Masloman, NF Dkk. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *Lex Administratum.* 10(3), 9.

Wicaksono, SP., Hidayat. A. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal Demokrasi Lokal. *E-Journal UNDIP.* 7.

Manurung, EH., Heliany, I. Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Pemilu Terhadap Perindo Karena ‘Curi Start’ Kampanye Dalam Pemilu 2019. *Jurnal USM Law Review.* 182.

Halilah S. dan Arif , MF. Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. 4(2), 61.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Legislatif

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XII/2023

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28.P/HUM.2023

Putusan Bawaslu Nomor 01/PS.REG/BAWASLU/XI/2023

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024

Internet

KBBI, *Arti Asas*. Diakses pada 21 Januari 2025 dari <https://kbbi.web.id/asas>